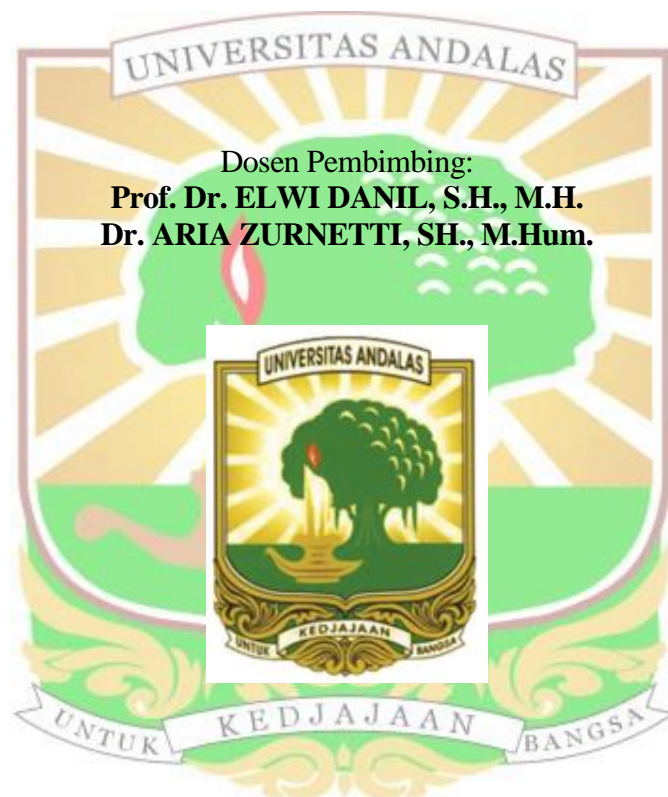


TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA  
YANG DISERTAI DENGAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
(Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/Pn.Slk)

*Diajukan guna memenuhi tugas akhir*  
Program Pascasarjana



Dosen Pembimbing:  
**Prof. Dr. ELWI DANIL, S.H., M.H.**  
**Dr. ARIA ZURNETTI, SH., M.Hum.**

Disusun Oleh:

**YESSY YULIANTI**  
**1620112061**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
2019**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA YANG DISERTAI DENGAN  
SANKSI REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/Pn.Slk)

(Yessi Yulianti, 1620112061, Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 2019)

**ABSTRAK**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mencapai tujuannya mengatur adanya penjatuhan sanksi pidana maupun tindakan. Penjatuhan sanksi pidana maupun tindakan terhadap terdakwa berada ditangan hakim yang merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana yang terintegrasi dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana dengan melibatkan berbagai sub-sistem dalam rangka menyelenggarakan ketertiban hukum bagi masyarakat. Salah satunya adalah ketertiban hukum terhadap Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian baik dalam tingkat lokal, nasional dan Internasional. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara yang disertai dengan sanksi rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, 2). Bagaimanakah pembuktian perkara yang putusannya berupa sanksi pidana penjara yang disertai dengan sanksi rehabilitasi, dan 3). Bagaimanakah pelaksanaan putusan Rehabilitasi yang disertai dengan sanksi pidana penjara. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informen sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat peluang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara bersamaan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun penjatuhan bentuk sanksi tersebut masih menimbulkan kendala di lapangan diantaranya karena belum adanya kesatuan persepsi aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait khususnya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta belum adanya ketentuan yang tegas mengatur tata cara pelaksanaan bentuk putusan tersebut, sehingga juga masih menimbulkan persoalan atau kendala dalam pelaksanaannya bagi lembaga terkait. Namun hal ini hendaknya menjadi pemikiran bagi penyusun regulasi demi terwujudnya penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.

***Kata Kunci : Sanksi Pidana, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika.***